**KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SUMBER
HUKUM DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 60/PUU-
XXII/2024**

Dwi Fridayanti

UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117, Surabaya

Email: 05020421037@student.uinsby.ac.id

Naskah dikirim: 09/12/2024, direvisi: 06/01/2025, diterima:03/02/2025

Abstract

As a judicial institution, the Constitutional Court has the authority to test the constitutionality of a law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The decision of the Constitutional Court is generally binding or final and there is no legal remedy or binding. Although there is no legal remedy in its decision, the existence of the Constitutional Court Decision in the source of law is still gray. Jurisprudence has an important function in Indonesia, but it does not yet have a clear legal position in the legal system both in theory and practice. This research will examine and relate the position of Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XII/2024 in the source of law in Indonesia. The Constitutional Court's decision relates to the parliamentary threshold, which is the threshold for the number of seats of political parties in the DPRD in an election. Through a normative juridical approach, this research will explore how the Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XII/2024 plays a role in changing legal norms in Indonesia through relevant legislation, journals, books, and related literature studies. This research aims to provide an analysis of the position of the Constitutional Court Decision on the legal system in Indonesia by providing a case study of Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XII/2024.

Key Words: *Constitutional Court, Constitutional Court Decision, Source of Law*

Abstrak

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara umum atau *final* dan tidak ada upaya hukum atau *binding*. Meskipun tidak ada upaya hukum dalam putusannya, namun eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sumber hukum masih abu-abu. Yurisprudensi memiliki fungsi yang penting di Indonesia, tetapi belum

memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum baik secara teori maupun praktik. Penelitian ini akan mengkaji dan mengaitkan kedudukan Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024 dalam sumber hukum di Indonesia. Putusan MK *a quo* berkaitan dengan *parlementery threshold*, yakni ambang batas jumlah kursi partai politik di DPRD di dalam pemilihan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024 berperan dalam perubahan norma hukum di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan terkait jurnal, buku, dan studi kepustakaan yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait kedudukan Putusan MK terhadap sistem hukum di Indonesia dengan memberikan studi kasus terhadap Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan MK, Sumber Hukum

A. Pendahuluan

Di Indonesia, UUD 1945 merupakan konstitusi sebagai landasan dan acuan dalam seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia menerapkan sistem hukum *rechstaat* yang mengedepankan supremasi hukum dan konstitusi. Dalam hal menjaga konstitusi untuk menegakkan supremasi hukum, terbentuklah lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang sebagai *guardian of constitution*, serta sebagai lembaga yang akan menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Selain sebagai penjaga konstitusi, MK juga memiliki kewenangan sebagai *interpreter of constitution* yaitu penafsir konstitusi.

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia membentuk sebuah lembaga penting bernama Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan menjaga konsistensi konstitusi negara. Tepat pada bulan Agustus 2003, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, MK resmi didirikan dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah tugas strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini bertugas mengadili perkara hukum, menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, memutuskan status partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Peran MK sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemurnian konstitusi di Indonesia, sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam sistem ketatanegaraan.

Dengan kewenangannya yang luas, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menjamin tegaknya prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Dalam perkembangannya, MK eksis ketika dalam pimpinan Prof. Mahfud. Terbukti dalam putusan-putusan MK yang memberikan jalan keluar atas hukum ketatanegaraan serta dalam pelaksanaannya MK mengdepankan prinsip keadilan. Meskipun begitu, MK juga pernah mengalami penurunan kinerja tepatnya pada tahun 2013, dibuktikan dengan ketua MK Akil Mochtar yang tertangkap kasus korupsi di rumah dinas.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak hanya memiliki fungsi yang fokus untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan konstitusionalitas suatu norma hukum, tetapi juga memiliki fungsi untuk menjaga hak-hak konstitusi warga negara. MK memberikan jaminan bahwa tiap perundang-undangan yang ditetapkan tidak akan bertentangan dengan hak warga negara. Sebab, putusan MK bersifat *erga omnes* yakni mengikat secara umum. Selain itu, MK juga memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya harus tetap berada dalam lingkaran paham konstitusionalisme. MK sebagai bagian dari organ negara yang juga harus tunduk terhadap paham konstitusionalisme, meskipun MK memiliki kewenangan dalam melakukan uji konstitusionalitas suatu undang-undang. Sehingga bukan hanya lembaga legislatif saja yang tidak sesuai ketentuan konstitusi, yudikatif pun akan mendapatkan timbalan sebagaimana mestinya apabila tidak sesuai dengan konstitusi.

Demokrasi di tingkat daerah diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri secara langsung dan demokratis. Pilkada merupakan cerminan nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, di mana masyarakat setempat memiliki kuasa penuh untuk menentukan figur kepemimpinan yang akan membawa daerahnya ke

arah kemajuan. Melalui mekanisme ini, setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan memberikan suaranya kepada calon pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif. Mekanisme pemilihan langsung ini merupakan implementasi konkret dari sila keempat Pancasila, yakni kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pilkada menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kehendaknya dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

Oleh sebab itu pilkada merupakan bentuk demokrasi di tingkat daerah serta menjadi tempat untuk mendapatkan kekuasaan di daerah sebagaimana pemilu presiden dan legislatif. Pada dasarnya pilkada dilakukan untuk memberikan pemimpin terbaik terhadap masyarakat dan sesuai dengan kehendak rakyat.

MK dalam putusannya berimplikasi pada pelaksanaan pilkada serta berdampak pada sistem hukum di Indonesia. Dalam objek kajian penelitian ini, yaitu Putusan MK No. 60/2024, akan berimplikasi pada sistem hukum di Indonesia, khususnya terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan MK *a quo* memberikan dampak pada perubahan suatu undang-undang, sehingga dalam penelitian ini juga akan menakar bagaimana Putusan MK dalam perubahan suatu perundang-undangan dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Putusan MK 60/2024 ini memunculkan pro kontra di dalam masyarakat. Sedangkan dalam segi yurisprudensi, Putusan MK bersifat *final and binding*, memiliki kekuatan hukum tetap hingga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Putusan MK mengikat secara umum (*erga omnes*) tidak pada pihak-pihak yang berperkara saja. Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni akan disajikan berupa paragraf dan narasi, bukan berbentuk data. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan daftar literatur lainnya serta kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Tipe penelitian ini adalah preskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran serta merumuskan

masalah yang berdasarkan pada keadaan dan kenyataan yang ada, dengan menganalisis suatu hukum.

Berdasarkan Putusan MK No 60/2024, kemudian akan telaah dan dirinci lebih lanjut terkait dengan kedudukan Putusan MK terhadap sumber hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan membahas terkait dengan studi kasus Putusan MK No 60/2023 yang kemudian ditelaah kedudukannya di dalam sumber hukum di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1 Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sumber Hukum di Indonesia

Dalam hukum, terdapat dua sistem hukum yang berbeda yakni sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Kedua sistem tersebut memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam menerapkan hukum. Pada sistem *Civil Law*, hukum bersifat konservatif dan statis. Hakim harus terikat pada aturan tertulis yang sudah ada dan tidak bisa menafsirkan di luar undang-undang. Jika terjadi pertentangan antara undang-undang dan putusan hakim sebelumnya, maka undang-undang akan selalu berada di tingkat pertama. Sistem ini lebih menekankan pada kepastian hukum yang tertulis. Sedangkan, sistem *Common Law* lebih dinamis dan berkembang. Menganggap hukum sebagai budaya yang hidup dan terus berubah seiring berkembangnya masyarakat. Dalam sistem ini, hakim memiliki peran sangat penting dalam menciptakan hukum melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Ketika terjadi perbedaan antara undang-undang dan yurisprudensi, maka putusan hakim akan lebih diutamakan. Sistem ini lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat.¹

Sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* memiliki perbedaan dalam yurisprudensi. Dalam sistem *Civil Law*, yurisprudensi bersifat tambahan dan tidak mengikat. Artinya, hakim boleh mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya, dan undang-undang tetap

¹ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 83.

menjadi acuan utama di dalam ketatanegaraan. Di sisi lain, pada sistem *Common Law*, yurisprudensi memiliki kedudukan yang jauh lebih penting. Putusan-putusan hakim sebelumnya bersifat mengikat dan wajib dijadikan rujukan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara. Dalam sistem ini, yurisprudensi memiliki kekuatan hukum yang hampir sama, bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan undang-undang. Meskipun kedua sistem ini memiliki yurisprudensi, namun cara pandang dan penerapannya sangat berbeda. *Civil Law* lebih menitikberatkan pada kepastian hukum tertulis, sementara *Common Law* lebih menekankan pada fleksibilitas dan perkembangan hukum melalui putusan-putusan hakim.²

Negara yang menganut sistem hukum *common law*, yurisprudensi sebagai sumber hukum yang eksistensinya sangat penting, sebab disamping undang-undang putusan hakim juga memiliki peranan yang penting. Maka, berdasarkan teori maupun praktiknya, di dalam kedua sistem hukum *civil law* maupun *common law*, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Negara yang menganut sistem hukum *civil law*, yurisprudensi hanya memiliki kekuatan mengikat secara persuasif, artinya nantinya ketika hakim memutuskan suatu kasus tidak harus berpedoman pada yurisprudensi di atasnya.³

Di Indonesia, yurisprudensi termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴, yang menyebutkan bahwa, “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Yang dalam pasal ini dapat ditafsirkan bahwa, hakim dalam menetapkan putusan harus berdasar pada nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.

Secara historis, Indonesia lebih menekankan pada sistem *civil law* yakni dari masa penjajahan Belanda yang juga menganut sistem *civil law*, namun tidak memiliki dasar dan acuan yang jelas terkait dengan adanya yurisprudensi.

² Holili Holili, M. Yunus, and Winarto Winarto, “Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia sebagai Penganut Sistem Civil Law,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (January 23, 2024): 3718–3726.

³ Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia.”

⁴ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yurisprudensi di Indonesia berfungsi sangat penting, namun sayangnya tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, baik secara teori maupun praktik.⁵

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwasanya kedudukan yurisprudensi merupakan suatu hal penting, namun kedudukannya masih abu-abu, baik dalam teori maupun praktiknya, hal ini diyakini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Teori hukum atau dalam pengajarannya lebih menegaskan pada penguasaan dari definisi hukum, yang bersifat abstrak, dan teori secara umum;
2. Asas dan kaidah hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang hanya berpacu pada peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dari berlakunya hukum, artinya tidak memberikan penafsiran dari ketentuan perundang-undangan tersebut terhadap putusan hakim;
3. Yurisprudensi tidak terpublikasikan dengan luas, sehingga sulit untuk mendapatkan dan mempelajarinya;
4. Adanya kebijakan penelitian hukum yang memberi kemudahan berupa lapangan atau fasilitas guna meneliti putusan hakim atau yurisprudensi.⁶

Dalam sistem hukum, terdapat prinsip fundamental yang mewajibkan hakim untuk selalu mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Yurisprudensi memiliki peran penting sebagai sumber hukum, di mana putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan acuan oleh hakim lain dalam memutuskan kasus serupa. Seorang hakim memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum. Mereka tidak sekadar memutuskan perkara, melainkan juga harus memahami dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang hidup di masyarakat. Di Indonesia, yurisprudensi memiliki fungsi sebagai sumber hukum dan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam situasi kekosongan hukum, yurisprudensi dapat berperan untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim seharusnya berperan aktif menciptakan hukum sebagai panduan, hingga terbentuklah sistem hukum yang komprehensif dan baku. Disebutkan dalam konsep hukum *Algeme Bepalingen*

⁵ Disusun Oleh and DR Paulus Effendie Lotulung, "Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum".

⁶ Holili, Yunus, and Winarto, "Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia sebagai Penganut Sistem Civil Law."

van Wetgeving yang menegaskan bahwa hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak adanya aturan hukum yang mengatur perkara tersebut.

B.2 Putusan MK Sebagai Sumber Hukum Perubahan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengawal konstitusi atau *the guardian of constitution* melalui sistem peradilan modern. Termuat dalam UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki tugas untuk mengadili perkara-perkara tertentu sesuai kewenangannya sebagai cabang dari kekuasaan yudikatif. Sebagai pengawal konstitusi, maka mahkamah konstitusi juga bertugas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak konstitusionalnya.⁷

Kewenangan MK secara rinci termuat dalam Pasal 24C UUD 1945, kewenangan tersebut diantaranya memuat; memutus sengketa kewenangan lembaga negara, mengadili perselisihan hasil pemilu, memutus pembubaran parpol, dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau *judicial review*. Mahkamah konstitusi selain sebagai pengawal konstitusi, juga melakukan interpretasi konstitusi.⁸ Dalam konsep *judicial review*, apabila dari hasil pengujian atau interpretasi menyatakan bahwa terdapat pelanggaran dalam hal konstitusionalitas, maka mahkamah konstitusi dalam putusannya berhak untuk menyatakan undang-undang tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut.⁹

Di Indonesia, lembaga pengadilan menjalankan kewenangannya sebagai penguji konstitusionalitas undang-undang, namun melalui batasan-batasan tertentu. Ketika MK menyatakan suatu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, putusan tersebut hanya berlaku untuk kasus yang sedang ditangani oleh lembaga tersebut. Artinya, meskipun suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional dalam satu kasus, lembaga lain masih dapat menggunakan

⁷ Iblaw School of Law. (February, 2014) diakses di <https://iblam.ac.id/2024/02/11/kenali-fungsi-dan-sistem-mahkamah-konstitusi/>. Pada 06 Oktober 2024.

⁸ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Pusat Studi Konstitusi FH Andalas (2010). Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi (7) 6. Hal: 149-227.

undang-undang tersebut di kasus yang berbeda. Namun, jika MK secara tegas menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, maka undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengendalikan konstitusi. Setelah pembatalan, undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan di manapun, baik di lembaga pemerintahan maupun dalam masyarakat. Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, MK dapat membatalkan dan mencabut undang-undang tersebut.¹⁰

Dalam hal judicial review, MK dalam putusannya akan mengikat secara umum (*erga omnes*) kepada lembaga manapun dan seluruh masyarakat saat setelah suatu putusan disahkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU MK, Putusan mahkamah konstitusi juga akan berimplikasi terhadap batalnya suatu peraturan perundang-undangan. *Pertama*, jika permohonan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. *Kedua*, permohonan dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang kuat dan valid dari sisi hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap materi permohonan. *Ketiga*, apabila permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa suatu materi undang-undang, baik pasal maupun ayat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. *Keempat*, permohonan juga dapat dikabulkan jika MK menemukan bahwa proses pembentukan dan perumusan undang-undang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUD 1945. *Kelima*, jika setelah pemeriksaan mendalam, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa undang-undang atau materi muatannya tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka permohonan akan dinyatakan ditolak.

Meski begitu, juga terdapat pelaksanaan putusan yang dapat dilakukan tanpa membutuhkan pengaturan untuk melaksanakan. Putusan yang membatalkan suatu norma atau dengan adanya putusan tersebut tidak berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang lain, dapat langsung

¹⁰ Idris Tarwin (2020). *Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*. Lex Renaissance (3) 5. Hal: 607-625.

dilaksanakan atau menjadi putusan yang tidak membutuhkan pengaturan untuk melaksanakan. Maka, norma-norma yang termuat dalam undang-undang merupakan suatu himpunan, yang artinya dalam MK dalam pelaksanaan putusannya harus melalui langkah-langkah yang disesuaikan dengan muatan putusan. Begitu pula terhadap putusan yang dalam pelaksanaannya tidak diperlukan perubahan pada suatu peraturan perundang-undangan ataupun membentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Begitupula sebaliknya, putusan yang akan berimplikasi terhadap norma-norma lain, harus dilakukan dengan memberikan pengaturan tambahan sebelum pelaksanaan putusan.¹¹

Pengaturan terkait *parlementery threshold* termuat dalam UU No 32 Tahun 2014. Seperti halnya pada Putusan MK 60/2024 yang dalam putusannya memberikan arahan untuk mengubah ambang batas atau *parlementery threshold*. Maka, ketika terdapat putusan MK yang harus dilaksanakan sesaat setelah diputuskan, haruslah dibarengi dengan pengaturan untuk melaksanakan. Putusan MK akan berlaku saat itu juga, maka saat undang-undang dilakukan perubahan, Putusan MK *a quo* yang menjadi dasar adanya pengaturan baru terkait ambang batas *parlementery threshold*.¹²

Begitu pula dalam hal perubahan UU No 32 Tahun 2014. Dasar dari perubahan yang terdapat dalam salah satu pasal pada undang-undang *a quo* adalah Putusan MK 60/2024. Hal ini jelas bahwasanya Putusan MK bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam perubahan suatu peraturan perundang-undangan. Namun, secara teori maupun praktiknya tidak diberikan kejelasan terkait Putusan MK dapat dijadikan sebagai sumber hukum, atau kedudukannya masih abu-abu.

Maka dalam hal ini, Putusan MK akan berimplikasi pada 2 hal:

- a. *Executable* atau putusan yang langsung dapat dilaksanakan tanpa tindak lanjut atau pengaturan lain untuk melaksanakannya;

¹¹ Hartono Hasim (2024). *Urgensi Putusan Mk Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60/Puu-Xxii/2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election*. JICN: Jurnal Intelék dan Cendekiawan Nusantara(1), No 4. Hal 5374-5384.

¹² Kusnadi Kuswanto (2020). Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* (5) 1, hal: 1-20.

- b. Putusan yang membutuhkan pengaturan lain dan tidak lanjut lain terhadap pembentukan suatu perundang-undangan ataupun perubahan suatu undang-undang yang terkait.¹³

Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti putusan tersebut langsung memengaruhi kebijakan legislasi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, pihak-pihak terkait akan berkoordinasi dengan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban untuk menyusun program legislasi nasional yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 UU MK yang memberikan pengertian bahwa untuk mewajibkan putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada beberapa lembaga negara, yakni DPR, DPD, Presiden, dan MA. Dengan demikian, putusan tersebut akan ditindaklanjuti dan menjadi acuan dalam proses legislasi selanjutnya.¹⁴

Putusan MK No 60/2024 yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2024 ini memberikan beberapa poin perubahan terkait persyaratan pendaftaran kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹⁵

1. Mahkamah Konstitusi menghapuskan ambang batas 20% jumlah kursi DPRD;
2. Mahkamah Konstitusi memberikan perubahan terkait jumlah akumulasi ambang batas sah yang terdapat di wilayah terkait, seperti hal nya dari 25% menjadi 10%, 8.5%, 7.5%, dan 6.5% yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di wilayah pemilihan tersebut;
3. Mahkamah Konstitusi memberikan Kebebasan kepada partai politik untuk mengeluarkan kader-kadernya sebagai calon kepala dan wakil di pilkada tanpa perlu melakukan koalisi dengan partai politik lainnya yang memiliki tempat di parlemen.¹⁶

¹³ Widati Wulandari et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (February 15, 2022): 480.

¹⁴ Pasal 59 Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁵ Putusan MK No 60/2024

¹⁶ Hasim Hartono, "Urgensi Putusan Mk Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024," no. 4 (2024).

Putusan MK No. 60/2024, memberikan perubahan atas ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah atau disebut dengan *parlementary threshold*. Dengan begitu, MK memberikan kebebasan terhadap partai politik untuk mengusung calon pasangan di pilkada tanpa perlu berkoalisi dengan partai politik lain yang memiliki kursi di parlemen.

Syarat untuk bisa mengusulkan pasangan calon melalui partai politik ataupun koalisi dengan partai politik lain dapat dilakukan berdasarkan hasil suara sah saat pemilu saja. MK dalam putusan ini memberikan pertimbangan kepada masyarakat untuk lebih menghargai suara warga negara dalam pemilu sebagai pilkada, dan tidak menganggap remeh terhadap partai politik lain yang tidak memiliki kursi di parlemen.¹⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengkajian terhadap UU N 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam putusannya, MK menyampaikan beberapa pasal dalam UU dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Melalui putusan ini, MK secara tegas membatalkan ketentuan hukum yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, memberikan penafsiran ulang terhadap peraturan yang ada, dan memastikan produk hukum sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, MK mencabut keberlakuan Pasal 40 ayat (1) pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal ini berarti pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menunjukkan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjamin konsistensi hukum dan perlindungan konstitusional.

Putusan *a quo* jelas bahwa hasil dari uji konstitusionalitas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 40 (1) UU Pilkada tidak berkekuatan hukum mengikat. Lantas, apakah Putusan MK *a quo* dapat dijadikan dasar atau sumber hukum dilakukannya perubahan terhadap undang-undang terkait?

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Final berarti putusan tersebut merupakan putusan terakhir yang tidak dapat diganggu gugat melalui upaya

¹⁷ Ibid.

hukum apapun. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa setelah MK mengeluarkan putusan, tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan banding atau gugatan ulang. Putusan MK bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Sifat mengikat bermakna bahwa putusan tersebut berlaku secara hukum dan mengikat seluruh lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, putusan MK memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan final.¹⁸

Kekuatan hukum mengikat dalam putusan MK tidak ditujukan kepada semua pihak atau *erga omnes*, melainkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti putusan MK, yakni DPR atau Presiden. Selain itu, MK merupakan lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, bukan merupakan lembaga legislatif yang berwenang dalam membuat undang-undang. Maka, Putusan MK tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif, akan tetapi Putusan MK dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam penyusunan atau perubahan suatu peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan pelaksanaan putusannya.¹⁹

Apabila terdapat perubahan atau pembentukan peraturan yang didasarkan pada tindak lanjut Putusan MK, maka proses tersebut harus dilakukan oleh DPR atau Presiden. Dengan demikian, proses legislasi tetap terkendali dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Materi muatan yang harus ada dalam sebuah undang-undang tercantum dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat lima kriteria dalam penyusunan undang-undang, diantaranya:²⁰

1. Undang-undang harus menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menindaklanjuti perintah dari undang-undang lain, yang membutuhkan pengaturan lebih detail;

¹⁸ Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 8 UU No 8 Tahun 2011 jo. UU No 7 Tahun 2020.

¹⁹ Adnan Yazar (2013). *Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy*. Padjajaran Law Review I. Hal: 1-13.

²⁰ Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-undang dapat berisi ikrar atau ratifikasi terhadap perjanjian internasional;
4. Undang-undang harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-undang harus memenuhi kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Maka, dapat ditarik benang merah, bahwa apabila amar Putusan MK menyatakan bahwa apabila suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka perlu upaya untuk menyegerakan putusan tersebut. Namun, berdasarkan fakta empiris, dalam hal untuk menindaklanjuti Putusan MK yang mempengaruhi suatu undang-undang perlu memerlukan banyak tahapan, proses, dan waktu yang panjang. Maka, untuk menghindari adanya kekosongan hukum pada saat undang-undang dinyatakan batal/tidak berlaku, dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).²¹

C. Penutup

Dari paparan penulis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa: Yurisprudensi di Indonesia sangat penting. Dalam fungsinya sebagai sumber hukum, juga sebagai pedoman bagi hakim saat memutuskan suatu perkara. Namun berdasarkan fakta empiris, yurisprudensi tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.

MK sebagai lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. MK bukanlah lembaga legislatif, yang dalam kewenangannya untuk membuat undang-undang. Putusan MK tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif sebab tidak memiliki kewenangan, melainkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sumber hukum dalam penyusunan atau perubahan suatu aturan hukum yang dinyatakan inkonstitusional/batal/ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.

²¹ PTSP Kejaksaan. (2022). “Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Normatif)”. Diakses di <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/kepastian-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-kajian-normatif>. Pada 06 Oktober 2024, pukul 23:20.

Daftar Pustaka

- Adnan Yazar (2013). *Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy*. Padjajawan Law Review I. Hal: 1-13.
- Disusun Oleh and DR Paulus Effendie Lotulung, “Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum”.
- Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 83.
- Hartono Hasim (2024). *Urgensi Putusan Mk Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60/Puu-Xxii/2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election*. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara(1), No 4. Hal 5374-5384.
- Hasim Hartono, “Urgensi Putusan Mk Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024,” no. 4 (2024).
- Holili Holili, M. Yunus, and Winarto Winarto, “Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia sebagai Penganut Sistem Civil Law,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (January 23, 2024): 3718–3726.
- Iblaw School of Law. (February, 2014) diakses di <https://iblam.ac.id/2024/02/11/kenali-fungsi-dan-sistem-mahkamah-konstitusi/>. Pada 06 Oktober 2024.
- Idris Tarwin (2020). *Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batakkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*. Lex Renaissance (3) 5. Hal: 607-625.
- Kusnadi Kuswanto (2020). Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* (5) 1, hal: 1-20.
- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 8 UU No 8 Tahun 2011 jo. UU No 7 Tahun 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 40 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

PTSP Kejaksaan. (2022). "*Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Normatif)*". Diakses di

<https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/kepastian-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-kajian-normatif>. Pada 06 Oktober 2024, pukul

23:20.

Pusat Studi Konstitusi FH Andalas (2010). Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* (7) 6. Hal: 149-227.

Putusan MK No 60/2024

Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia."

Widati Wulandari et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (February 15, 2022): 480.